

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perusahaan, laporan keuangan disusun oleh pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Informasi tentang laba mempunyai peran sangat penting bagi pihak berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal dan eksternal perusahaan menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, ukuran prestasi atau kinerja manajemen, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, serta pengambilan keputusan investasi dan peminjaman dana kepada perusahaan (**Lestari, 2018**).

Kondisi perusahaan yang tidak sehat seringkali oleh manajemen ditutupi dengan menampilkan atau melaporkan kinerja keuangannya tetap baik dengan melakukan manajemen laba. Salah satu cara perusahaan dapat mengelola pendapatan mereka adalah dengan membuat penyesuaian akrual diskresioner, yang diizinkan karena basis akrual akuntansi memerlukan perkiraan yang harus dibuat sebagai bagian dari proses akuntansi dan pelaporan keuangan (Sutadipraja et al., 2019).

Scott (2012:24) mendefinisikan manajemen laba sebagai “*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*” yang

kurang lebih memiliki arti “pemilihan yang dilakukan oleh manajer dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan pada periode tertentu” (Lestari, 2018).

Oleh karena itu, usaha untuk mengurangi fluktuasi laba, dalam hal ini manajemen mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi baik, Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan. Namun manajemen laba (*earnings management*) merupakan fenomena yang sukar untuk dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual karena akrual memiliki kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar akrual dipilih karena memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari aspek penerimaan dan pengeluaran kas terkini (Malik, 2015).

Pajak adalah kontribusi bersifat wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1). Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Hanifatusa'idah et al., 2019).

Kasus pada perusahaan Toshiba yang terjadi pada tahun 2015, Toshiba mulai menyelidiki praktik akuntansi di divisi energi. Menurut sebuah komite

independen, perusahaan menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar atau sekitar \$1,2 miliar selama 7 tahun. Akibat skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan, saham Toshiba telah turun sekitar 20 persen sejak awal april ketika isu-isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar perusahaan hilang sekitar ¥1.673 triliun (\$13,4 miliar) dan para analis memperkirakan saham Toshiba masih akan terus turun. Selain itu kasus manajemen laba juga terjadi pada Sinar Mas Group, Indomobil, dan Lippo Bank.

Isu yang hangat pada tahun 2019 menjadi perbincangan saat ini adalah kasus PT Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi yang mengadakan perjanjian kerja sama mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan manajemen konten. Penggunaan asset Garuda oleh Mahata harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK 23, yaitu diklasifikasikan sebagai pendapatan royalty. Hal ini memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dengan cara mengakui penghasilan sekaligus dalam satu tahun atau mengakui penghasilan secara tersebar dalam jangka waktu perjanjian.

Aset pajak tangguhan adalah salah satu faktor umum penyebab tindakan manajemen laba, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan temporer yang mengakibatkan terpulihkannya jumlah pajak diperiode mendatang. Perbedaan temporer terjadi pada saat terdapat penyesuaian suatu perilaku dalam perpajakan menurut akuntansi dan ketentuan perpajakan. Aturan yang terdapat dalam perpajakan mewajibkan perusahaan agar melakukan penyesuaian terhadap laba

fiskal perusahaan yang diakibatkan oleh perbedaan konsep serta cara yang digunakan untuk mengukur pendapatan dan biaya, yang akan menyebabkan selisih antara jumlah laba akuntansi dengan jumlah laba fiskal (**Siti Aminah, 2019**).

Aset pajak tangguhan (*deffered tax asset*) timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan (**Timuriana & Muhamad, 2015**).

Aset pajak tangguhan adalah salah satu isu yang dibahas pada PSAK 46 yang merupakan bagian paling sulit dipahami oleh sebagian besar praktisi pelaporan keuangan hingga saat ini. Pengakuan pajak tangguhan adalah konsekuensi dari alokasi pajak antar periode pelaporan keuangan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan neraca (**Sutadipraja & Ningsih, 2019**).

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak (**Fitriany et al., 2016**).

Aset pajak tangguhan adalah perbedaan antara pembayaran pajak dan pajak sebagai akibat dari perbedaan temporer antara GAAP Indonesia dan undang-undang pajak, dan kerugian kompensasi pada periode berikutnya (**Hanifatusa'idah et al., 2019**).

Beban pajak tangguhan berbeda dengan aset pajak tangguhan, aset pajak tangguhan merupakan elemen laporan neraca sedangkan pajak tangguhan

merupakan laporan laba rugi. Perbedaan dalam bidang perpajakan umumnya terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, karena ada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin.

Beban pajak tangguhan adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (**Negara & Suputra, 2017**).

Beban pajak tangguhan suatu perusahaan, dimana semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen atau dengan timbulnya kewajiban pajak tangguhan yang menimbulkan adanya koreksi negatif karena adanya perbedaan waktu dapat terdefiniskan dalam beban pajak tangguhan dan digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan (**Devi Intan Satyaningrum, 2016**).

Beban pajak tangguhan timbul karena perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan menurut peraturan perpajakan. Laporan keuangan komersial disusun untuk menginformasikan para pemangku kepentingan mengenai kinerja keuangan perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun untuk menunjukkan kepada pihak pajak bahwa laba tersebut merupakan dasar untuk mengenakan pajak (**Anggara, 2018**).

Beban pajak tangguhan mencerminkan besarnya beda waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul karena adanya

kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak (**Malik, 2015**).

Mengingat bahwa kebijakan akrual tersebut merupakan cara manajer melakukan manajemen laba dan beban pajak tangguhan ini merefleksikan kebijakan akrual tersebut dengan besaran beda waktu yang dihasilkan, maka beban pajak tangguhan ini dijadikan suatu ukuran dalam mendeteksi manajemen dengan laba kena pajak yang ditunjukkan oleh beban pajak tangguhan (**Fayzhall, 2016**).

Beban pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan). Dengan pola seperti ini, Maka perusahaan tersebut akan melaporkan laba akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut perpajakan, sehingga akan meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya. Ini menunjukkan manajemen memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapat laba yang lebih besar di masa yang akan datang sehingga mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan.

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda waktu, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan laba kena pajak merefleksikan tingkat

kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Desy Anggraeni, 2014).

Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak. Beban pajak komersil adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh wajib pajak dari penghasilan sebelum pajak dalam laporan keuangan komersil dikalikan dengan tarif pajak penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi) (**Amanda & Febrianti, 2015**).

Income maximization saat *seasoned equity offerings* akan menghasilkan informasi laba yang semu dan dapat menyesatkan investor dalam pengambilan keputusan investasi karena telah mempercayai laba yang merupakan hasil rekayasa tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan pendeteksian terhadap indikasi praktek *income maximization*. Pendeteksian ini dapat dilakukan dengan menganalisis aktiva pajak tangguhan dan beban pajak kini (**Widiarjani & Sukartha, 2015**).

Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah yang harus dibayar oleh Wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (**Rahmi, 2013**).

Beban pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang undangan pajak yang berlaku (**Hidayat, 2018**).

Dengan demikian diperoleh beban pajak kini dari perkalian antara tarif pajak yang berlaku dengan laba kena pajak suatu perusahaan atau badan. Dalam beberapa hal, wajib pajak mempunyai kebebasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penentuan saat pengakuan pendapatan dan biaya, meskipun kebijakan akuntansi yang telah diterapkan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun (**Lindira dan Ketut, 2014**).

Penelitian (**Fitriany et al., 2016**) yang memperoleh hasil penelitian signifikan pada hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba (**Siti Aminah, 2019**). Dan menurut (**Salim, 2019**) hasil yang tidak signifikan pada hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Penelitian (**Lubis & Suryani, 2018**) menyatakan beban pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut (**Sasmi, 2017**) beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan menurut (**Wahyudi, 2018**) beban pajak tangguhan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Ukuran perusahaan sebagai *variable control* pada Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba. Menurut Aries dalam **Herawati (2015)**, Menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan hasil kerja manajemen dari beberapa dimensi yaitu arus kas bersih, pertumbuhan dan biaya modal. Ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar atau kecilnya) suatu perusahaan.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2015-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya perusahaan yang berusaha melakukan manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan atau menurunkan laba perusahaan.

2. Aset pajak tangguhan dijadikan proksi sebagai indikator dari praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
3. Semakin tinggi pajak yang ditanggung, semakin rendah laba yang didapat perusahaan.
4. Manajer berusaha agar laba perusahaan selalu kelihatan lebih rendah dari pada laba yang sesungguhnya diperoleh.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan penelitian agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah sarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini variable independen yaitu Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Kini serta variable dependen yaitu Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh aset pajak tangguhan secara parsial terhadap manajemen laba terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaruh beban pajak tangguhan secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia ?

3. Bagaimanakah pengaruh beban pajak kini secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimanakah pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan beban pajak kini secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh aset pajak tangguhan secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh beban pajak tangguhan secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh beban pajak kini secara parsial terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan beban pajak kini secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh didalam penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan kajian dan pengujian terhadap aset pajak tangguhan beban pajak tangguhan dan beban pajak kini serta pengaruhnya terhadap manajemen laba.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan dan kemajuan perusahaan.

3. Penelitian selanjutnya

Sebagai ajuan terutama penelitian yang berkaitan mengenai pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Beban Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI.